



**ANALISIS DAMPAK BIMBINGAN TEKNIS DAN PELATIHAN
TERHADAP PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KOTA BINJAI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

MUFIDAH LUBIS
NPM: 1415100157

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

N A M A : MUFIDAH LUBIS
NPM : 1415100157
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S 1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS DAMPAK BIMBINGAN TEKNIS
DAN PELATIHAN TERHADAP
PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

MEDAN, MARET 2019

KETUA PROGRAM STUDI

(ANGGI PRATAMA NST, SE, M.Si)

DEKAN



(Dr. SURYA NITA, SH, M.Hum)

PEMBIMBING I

(RAHIMA BR PURBA, SE, M.Si, Ak. CA)

PEMBIMBING II

(HASRUL AZWAR HASIBUAN, SE,



FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : MUFIDAH LUBIS
NPM : 1415100157
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS DAMPAK BIMBINGAN TEKNIS
DAN PELATIHAN TERHADAP
PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

MEDAN, MARET 2019

KETUA

(ANGGI PRATAMA NSI, SE, M.Si)

ANGGOTA I

(RAHIMA BR. PURBA, SE, M.Si, Ak, CA)

ANGGOTA II

(HASRUI. AZWAR HASIBUAN, SE, MM)

ANGGOTA III

(HERIYATI CHRISNA, SE, M.Si)

ANGGOTA IV

(JUNAWAN, SE, M.Si)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUFIDAH LUBIS
NPM : 1415100157
Fakultas / Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisa Dampak Bimbingan Teknis dan Pelatihan Berbasis Akrual pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih-media/ formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Maret 2019

Peneliti,


(Mufidah Lubis)



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

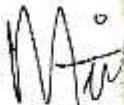
NAMA : MUFIDAH LUBIS
NPM : 1415100157
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : SI(STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS DAMPAK BIMBINGAN TEKNIS DAN
PELATIHAN TERHADAP PEMAHAMAN
STANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN ASET DAERAH KOTA
BINJAI

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Schubungan dengan hal ini tersebut maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai di masa yang akan datang.

Dengan demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, September 2018



MUFIDAH LUBIS

1395 /Perp/BP/2018
 Dinyatakan tidak ada sangkut
 paut dengan UPT. Perpustakaan
 UNPAB
 09 OCT 2018
 UPT. Perpustakaan

FM-BPAA-2012-041

Permohonan Meja Hijau



Medan, 01 Oktober 2018
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat



Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUFIDAH LUBIS
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 11 Maret 1997
 Nama Orang Tua : MUHAMMAD FAUZI LUBIS
 N.I.S.N : 1415100157
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 08991812500
 Alamat : Jl danau poso komplek lapngan teknis km 19

Sangat bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Dampak Lingkungan Teknis dan Pelatihan terhadap Pemahaman Standar Akutansi berbasis Akrual pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kota Binjai, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintansi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sebagai berikut :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,100,000

UKT-SO 70
 Rp. 2.500.000 +
 Rp. 4.600.000



Hormat saya
 MUFIDAH LUBIS
 1415100157

- 1. Surat permohonan ini sah dan bertaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.yos.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : MUFIDAH LUBIS
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 11 Maret 1997
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100157
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 138 SKS, IPK 3.09

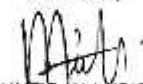
Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

No.	Judul Skripsi	Persetujuan
1.	Analisis Implementasi Laporan Keuangan berbasis AkruaI pada PT POS (PERSERO) Medan tahun 2008-2010	<input type="checkbox"/>
2.	Analisis Dampak Bimbingan Teknis dan Pelatihan terhadap Pemahaman Standar Akutansi berbasis AkruaI pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Aset Daerah Kota Binjai	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan pada PT Pos Persero Medan	<input type="checkbox"/>

Seluruh yang disetujui oleh Kepala Program Studi dibekukan tanda


 (Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 18 Juli 2018

Pemohon,

 (MUFIDAH LUBIS)

Nomor :
 Tanggal :

Disetujui oleh:
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum. II)

Tanggal :

Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Akuntansi

(Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

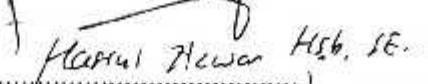
Tanggal :

Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing I :


 (Redwan Fauzan, SE.)

Tanggal :

Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II


 (Haurul Hewan Hsb, SE.)

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

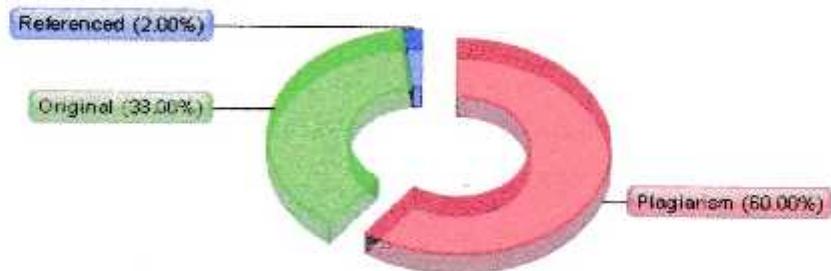
Analyzed document: 21-09-18 3:21:50 PM

"MUFIDAH LUBIS_1415100157_AKUNTANSI.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License2



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 33	wrds: 3621	http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/2182/Ririz%20Sstlawati%20Kusuma%20...
% 26	wrds: 2886	https://bkad.bantulkab.go.id/filestorage/dokumen/2017/05/1kj%20final.docx
% 24	wrds: 2741	http://beta.semarangkota.go.id/content/image/files/RENSTRA%202011-LAMP.pdf

Show other Sources:]

Processed resources details:

328 - Ok / 61 - Failed

Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating



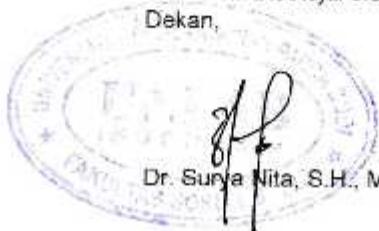
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Rahima Br. Purba SE., Msi AK.CA
 Dosen Pembimbing II : Kasrul Azwar Hasibuan SE, MM
 Nama Mahasiswa : MUFIDAH LUBIS
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100157
 Bidang Pendidikan : SI
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Dampak Bimtek dan pelatihan Terhadap Pemahaman Standard Akuntansi Berbasis Akrual Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah Kota Binjai

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
22/5/18	* Perbaiki Cover proposal * Perbaiki Daftar isi unitary dan isi sesuai Panduan Skripsi Acc Seminar  24/5/18	 	

Medan, 12 April 2018
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,


 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Rahma Br. Purba SE, Msi, AK, CA
 Dosen Pembimbing II : Kasri Apud Hastiawan SE, MM
 Nama Mahasiswa : MUFIDAH LUBIS
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100157
 Bidang Pendidikan : S1
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Dampak Bimtek dan Pelatihan terhadap Pemahaman Standart Akuntansi berbasis Akrual pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah Daerah Kota Binjai

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
24-2018	latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan, Batasan Masalah. Sumber Referensi, Deskriptif statistik.		
7/4-2018	Konsep konseptual Metapel		
1/5-2018	ACC UTK Diseminarkan		
			14/5-2018

Medan, 12 April 2018
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : RAHMA BR. PURBA SE, M.Si., AK-CA
 Dosen Pembimbing II : HASRUL AZWAR HASIBUAN SE, M.N
 Nama Mahasiswa : MUFIDAH LUBIS
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100157
 Bidang Pendidikan : SI
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Dampak Bimbingan Tennis dan pelatihan Terhadap Pemahaman Standar Akuntansi berbasis Akrual pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
21/8-2018	Masalah - Tujuan - Metodologi		
21/9-2018	Pembahasan - Hasil Penelitian		
21/9-2018	Pembahasan & Kesimpulan - Saran		
21/9-2018	Acc & sidangkan		Acc & sidangkan

Medan, 17 September 2018
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.H



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : RAHMA BR. PURBA SE., M.SI., AK.CA
 Dosen Pembimbing II : HASPUL AZWAR HASIBUAN SE., MM
 Nama Mahasiswa : MUFIDAH LUBIS
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100157
 Jenjang Pendidikan : S1
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Dampak Bimbingan Teknis dan Pelatihan Terhadap pemahaman standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
8/1/18	Tata letak tulisan diperbaiki		
	Kutipan buku > harus dibuat garis		
	Teknik pengumpulan data ditambahkan melalui kuisioner		

Medan, 17 September 2018

Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

fcc jilid lax
23/5-2019
P



**ANALISIS DAMPAK BIMBINGAN TEKNIS DAN PELATIHAN
TERHADAP PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KOTA BINJAI**

Ace jilid lax
23/5 2019
P

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

MUFIDAH LUBIS
NPM: 1415100157

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

ABSTRACT

This study aims to test and analyze the Impact of Technical Guidance and Training on Understanding Accrual-Based Accounting Standards at the Binjai City Regional Income and Asset Management Agency. Based on the method, this research is included as associative research, which is a study that aims to determine the influence or relationship between two or more variables. The population in this study were all State Civil Apparatus at the Regional Financial Management, Revenue and Asset Management Agency (BPKPAD) of Binjai City, amounting to 97 people. The sample used in this study is the employees in the Accounting Division of the Regional Financial Management, Revenue and Asset Management Agency (BPKPAD) of 11 people. This study uses questionnaires and conducts in-depth interviews with financial managers in the Binjai City Regional Income and Asset Financial Management Agency. The results of this study prove that technical guidance is able to improve the understanding of accrual-based accounting standards for implementers of regional financial administration at the Binjai City Regional Income and Asset Management Agency. The training was able to improve the understanding of accrual-based accounting standards for executors of regional financial administration at the Binjai City Regional Income and Asset Management Agency

Keywords: Technical Guidance, Training, Accrual-Based Government Accounting Standards

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Dampak Bimbingan Teknis dan Pelatihan terhadap Pemahaman Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai. Berdasarkan metodenya maka penelitian ini termasuk sebagai penelitian asosiatif yaitu merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Aparatur Sipil Negara pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai yang berjumlah 97 orang. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu para pegawai pada Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai sebanyak 11 orang. Penelitian ini menggunakan kuisisioner dan melakukan wawancara secara mendalam kepada para pengelola keuangan yang ada di Badan Penegelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa bimbingan teknis mampu meningkatkan pemahaman standar akuntansi berbasis akrual bagi para pelaksana penatausahaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai. Pelatihan mampu meningkatkan pemahaman standar akuntansi berbasis akrual bagi para pelaksana penatausahaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Kata Kunci : *Bimbingan Teknis, Pelatihan, Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah Penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena selalu mencurahkan kasih dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyusun skripsi ini yang merupakan persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu Penulis selama melakukan penyusunan sripsi ini.

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Anggi Pratama Nst, S.E., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
4. Ibu Rahima Br. Purba, S.E, M.Si, Ak., CA selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Hasrul Azwar Hasibuan, SE., MM, selaku Pembimbing II yang telah dengan sabar dalam memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Biro Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Kedua orang tuaku tersayang, Ayahanda dan Ibunda yang telah banyak berkorban baik moril dan materil juga materil, serta saudara-saudaraku dan seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Terima kasih kepada semua teman-teman dan sahabatku, yang telah memberikan kenangan manis selama dibangku perkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Dengan segala kerendahan hati Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca semua. Amiin.

Medan, Maret 2019
Penulis,

Mufidah Lubis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	10
1. Definisi Akuntansi	10
2. Akuntansi Keuangan Daerah.....	11
3. Basis Akuntansi	15
a. Akuntansi Berbasis Kas	15
b. Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual	16
c. Akuntansi Akrual	16
4. Tujuan dan Manfaat Basis Akuntansi Akrual	19
5. Komponen Pendukung Kesuksesan Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual ...	24
a. Komitmen dari Pimpinan	24
b. Sumber Daya Manusia yang Kompeten	25
c. Teknologi Informasi yang Memadai	26
6. Bimbingan Teknis	26
7. Pelatihan	29
B. Penelitian Terdahulu	34
C. Kerangka Konseptual	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	39
B. Tempat dan Waktu Penelitian	39

C. Definisi Operasional Variabel	40
D. Populasi dan Sampel	41
E. Jenis dan Sumber Data	42
F. Teknik Pengumpulan Data	43
G. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	45
1. Profil BPKPAD Kota Binjai	45
2. Deskripsi Pegawai BPKPAD Kota Binjai	50
B. Pembahasan	51
1. Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada BPKPAD Kota Binjai	51
2. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI	54
3. Bimbingan Teknis	55
4. Pelatihan	56
5. Pengaruh Pelaksanaan Bimtek dan Pelatihan	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Originalitas Penelitian..... 8
Tabel 2.1	Perbedaan Antara Diklat dan Bimtek..... 28
Tabel 2.2	Perbandingan Antara Pendidikan dan Pelatihan 35
Tabel 2.3	Penelitian Terdahulu 36
Tabel 3.1	Skedul Proses Penelitian 40
Tabel 3.2	Definisi Operasional..... 40
Tabel 4.1	Jenis Kelamin Pegawai 50
Tabel 4.2	Tingkat Pendidikan Pegawai..... 50
Tabel 4.3	Pangkat Golongan Pegawai..... 51
Tabel 4.4	Persepsi Responden terhadap Pemahaman SAP Berbasis Akrual 54
Tabel 4.5	Persepsi Responden terhadap Bimbingan Teknis 55
Tabel 4.6	Persepsi Responden terhadap Pelatihan 57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah	11
Gambar 2.1 Proses Pendidikan dan Pelatihan.....	33
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual telah membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia. Perubahan mendasar tersebut dapat dilihat dari perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket Undang-Undang Keuangan Negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.

Dengan diterbitkannya PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan dan yang di harapkan dapat menjadi acuan, patokan serta standar untuk diterapkan dalam lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah yang wajib untuk menyajikan laporan keuangan agar lebih terciptanya akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan keuangan daerah tersebut. Peraturan ini menjadi pedoman yang harus ditaati oleh setiap Daerah Otonom Kabupaten/Kota maupun Provinsi dalam menyajikan laporan keuangan berbasis akrual pada pemerintah daerahnya. Dalam hal ini

Pemerintah Kota Binjai sebagai pengguna anggaran juga wajib membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai PP No.71 Tahun 2010 dan Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah.

Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur tiga hal, yaitu; (1)mengatur masalah pengakuan yang membahas kapan suatu transaksi diakui untuk dicatat; (2)mengatur masalah pengukuran yang membahas bagaimana menetapkan nilai uang untuk dicatat dalam pos-pos laporan keuangan; dan (3)mengatur masalah pengungkapan basis akuntansi yaitu masalah pengakuan transaksi. Untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan basis akuntansi atau sistem pencatatan.

Penelitian mengenai Akuntansi berbasis akrual di Indonesia diantaranya dilakukan oleh Solihin (2007) yang menunjukkan kesiapan pemerintah yang masih kurang atas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. Sementara penelitian sebelumnya di beberapa negara mengenai adopsi sistem akuntansi berbasis akrual pada organisasi sektor publik, menyatakan bahwa implementasi dari sistem akuntansi berbasis akrual sering disertai dengan sejumlah besar kelemahan dan masalah (masalah akuntansi, sumber daya manusia, organisasi dan keuangan) yang menghambat atau menunda tingkat adopsi, sehingga transisi dari sistem akuntansi basis kas menuju basis akrual tidak akan terjadi secara cepat dan lengkap (Ranilhaj, 2016).

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan terpadu. Dampak yang dihasilkan dari penerapan sistem ini tidak dapat dilihat dalam waktu yang singkat. Pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pengenalan sistem akuntansi yang baru, khususnya pada konteks pemerintahan adalah penting. Keberhasilan atau kegagalan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah tidak lepas dari peran satuan kerja dan pengaruh dari faktor-faktor yang ada pada satuan kerja tersebut, mulai dari faktor sumber daya manusia seperti tingkat pendidikan staf, pelatihan yang diberikan, dan latar belakang pendidikan pimpinan, faktor organisasional seperti kualitas teknologi informasi, maupun faktor situasional lainnya seperti pengelolaan aset tetap.

Sejalan dengan diterapkannya SAP Berbasis Akrual baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dengan direvisinya PP No.24 Tahun 2005 menjadi PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, membawa beberapa perubahan dalam standar dan mekanisme penyajian laporan keuangan di pemerintah, serta didukung dengan ditetapkannya Permendagri No.64 Tahun 2013 Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015, dalam hal ini Pemerintah Kota Binjai secara keseluruhan telah menerapkan SAP berbasis akrual dalam penatausahaan keuangannya. Penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Kota Binjai masih berjalan 3 (tiga) tahun yaitu sejak tahun 2015, sehingga Pemerintah Kota Binjai membutuhkan sumber daya aparatur yang memadai dalam penatausahaan akuntansi berbasis akrual.

Berdasarkan penelitian Kirnanda (2016) diketahui bahwa dari 64 orang responden Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di lingkungan Pemerintah Kota Binjai, diketahui bahwa hanya sebanyak 4 orang atau 6,25% memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, dan responden yang memiliki latar belakang pendidikan non Akuntansi sebanyak 60 orang atau 93,75%.

Sedangkan untuk Intensitas Kursus/Diklat/Bimtek di Bidang Akuntansi atau Pengelolaan Keuangan Daerah ataupun Penyusunan Laporan Keuangan yang pernah diikuti responden dalam penelitian Kirnanda (2016), dapat dilihat mayoritas responden hanya pernah mengikutinya sebanyak 1-2 kali saja yaitu sebanyak 39 orang (60,9%) responden. Berdasarkan hal tersebut mayoritas aparatur pengelola keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Binjai masih belum optimal. Dengan minimnya jumlah aparatur dengan latar belakang pendidikan akuntansi dan minimnya kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini memberikan asumsi bahwa masih belum maksimalnya pemahaman aparatur dalam pengetahuan akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Suksesnya penerapan PP No. 71 Tahun 2010 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di sektor publik tentu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah kualitas sumber daya manusia dan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah daerah. Apabila dalam sebuah instansi pemerintahan memiliki kualitas sumber daya manusia yang handal serta didukung oleh teknologi informasi itu mampu menjadi modal awal dalam menunjang penerapan akuntansi berbasis akrual.

Menurut Hasibuan (2003), sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Jika dilihat dari sebuah instansi pemerintahan, pegawai SKPD merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berperan penting di dalam pencapaian tujuan organisasi. Tentunya, aparatur pemerintahan seharusnya dibekali dengan pengetahuan yang cukup khususnya terkait dengan PP No. 71 sehingga implementasi aturan tersebut dapat berjalan sebagaimana seharusnya. Sejalan dengan hal tersebut diatas, penelitian yang pernah dilakukan oleh Herlina (2013) menemukan bukti empirik bahwa Sumber Daya Manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kesiapan penerapan PP No. 71 Tahun 2010.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Dampak Bimbingan Teknis dan Pelatihan terhadap Pemahaman Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai**”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan bimtek dan pelatihan mengenai pemahaman standar akuntansi berbasis akrual bagi para pelaksana penatausahaan keuangan daerah;

- 2) Belum maksimalnya pemahaman aparaturnya mengenai pemahaman standar akuntansi berbasis akrual bagi para pelaksana penatausahaan keuangan daerah.

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari ketidakjelasan dalam penelitian ini maka perlu adanya pembatasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini hanya pada bimbingan teknis dan pelatihan mengenai pemahaman aparaturnya sipil negara tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai tahun penelitian 2018.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah bimbingan teknis mampu meningkatkan pemahaman standar akuntansi berbasis akrual bagi para pelaksana penatausahaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai?
- 2) Apakah pelatihan mampu meningkatkan pemahaman standar akuntansi berbasis akrual bagi para pelaksana penatausahaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai?

- 3) Bagaimana pelaksanaan pelatihan mengenai pemahaman standart akuntansi berbasis akrual bagi para pelaksana penatausahaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai
- 4) Apakah pelatihan mampu meningkatkan pemahaman standar akuntansi berbasis akrual bagi para pelaksana penatausahaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan bimtek dan pelatihan mengenai pemahaman standar akuntansi berbasis akrual bagi para pelaksana penatausahaan keuangan daerah;
- 2) Untuk mengetahui tingkat pemahaman aparatur mengenai pemahaman standar akuntansi berbasis akrual bagi para pelaksana penatausahaan keuangan daerah.

2. Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah pengetahuan mengenai pemahaman standar akuntansi berbasis akrual.

2) Bagi Lembaga Yang Diteliti

Penulis berharap dengan adanya hasil penelitian ini, instansi dapat memperoleh manfaat yang dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan pemahaman standar akuntansi berbasis akrual.

3) Bagi Ilmu Pengetahuan

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan masukan dan menjadi referensi yang berarti bagi para akademisi dan pihak-pihak lain yang melakukan penelitian tentang pemahaman standar akuntansi berbasis akrual.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Weda (2015) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, yang berjudul Kesiapan Instansi Pemerintah Dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa staf bagian keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur sudah cukup siap dalam penerapan SAP akrual, hal tersebut telah dibuktikan dengan para staf bagian keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur yang telah melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan. Bentuk persiapannya yaitu dengan mengikuti bimbingan teknis (Bintek) atau pelatihan dari Badan Pengelola

Keuangan Aset Daerah (BPKAD), dan mengikuti berbagai *workshop* mengenai implementasi standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual.

Tabel 1.1 Originalitas Penelitian

No.	Keterangan	Peneliti Terdahulu	Peneliti Sekarang
1	Lokasi Penelitian	Pemprov Jawa Timur	Kota Binjai
2	Tahun Penelitian	2015	2018
3	Data Penelitian	2015	2018
4	Metode Analisis	Deskriptif Kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi	Deskriptif Kualitatif dengan kuisisioner dan wawancara

Berdasarkan perbedaan-perbedaan lokasi, tahun penelitian, data, dan metode analisis yang digunakan menjadikan perbedaan yang membuat keaslian penelitian ini dapat terjamin dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Definisi Akuntansi

Halim dan Kusufi (2012) menyatakan bahwa akuntansi sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Akuntansi sebagai aktivitas jasa, yang berfungsi untuk menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan, mengenai entitas yang dipandang akan bermanfaat untuk pengambilan keputusan dalam menetapkan pilihan yang tetap diantaranya alternatif tindakan (Smith dan Skousen, 2009). Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan akuntansi adalah proses pencatatan, meringkas, mengelola, dan menyajikan data mengenai kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan orang lain yang menggunakannya.

Secara umum akuntansi dibedakan atas akuntansi sektor privat dan akuntansi sektor publik (Erlina dan Rasdianto, 2013).

a. Akuntansi Komersil Perusahaan (*Commercial Accounting*)

Akuntansi komersial merupakan akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada entitas bisnis (perusahaan) yang mencari keuntungan atau laba. Dalam akuntansi komersial, dikenal adanya proses pencatatan buku harian, penjurnalan, *posting* ke buku besar, pembuatan neraca saldo, pembuatan neraca lajur, pembuatan neraca akhir dan laba rugi. Laporan keuangan dimaksud adalah laporan neraca, laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Untuk menuju laporan tersebut, dibutuhkan keahlian akuntansi agar laporan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh profesi akuntan. Keahlian akuntansi dimaksud adalah

keahlian berupa pengenalan laporan neraca dan pos-pos neraca seperti aktiva, utang dan modal; laporan laba rugi dan pos-pos laba rugi seperti, pendapatan dan beban.

b. Akuntansi Sektor Publik.

Akuntansi Sektor Publik merupakan akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi nonprofit atau nirlaba. Secara sederhana, akuntansi sektor publik ini banyak dipakai oleh organisasi sektor publik, seperti partai politik, masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah atau universitas, lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah pusat. Dalam praktek keseharian, pengelola entitas ekonomi perlu memiliki keahlian akuntansi sektor publik agar laporan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan sektor publik atau yang lebih dikenal dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi keuangan daerah adalah suatu susunan yang teratur dari suatu asas atau teori untuk proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah, pemda (kabupaten, kota atau provinsi) yang disajikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan pengawasan keuangan, investor, kreditur dan donatur, analis ekonomi dan pemerhati pemda yang seharusnya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah (Darise, 2009).

Standar akuntansi menjadi kriteria audit bagi auditor sebagai dasar untuk menilai apakah laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Mahmudi, 2011). Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Bastian, 2010). Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada *stakeholders*.

Akuntansi sektor publik dibedakan atas: 1) Akuntansi Pemerintahan dan 2) Akuntansi Sosial.

1) Akuntansi Pemerintahan (*Governmental Accounting*)

Dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberi informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Akuntansi pemerintahan dibedakan atas akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah yang sering disebut dengan akuntansi keuangan daerah. Akuntansi pemerintah daerah terdiri dari akuntansi pemerintah provinsi dan akuntansi pemerintah kabupaten/kota. Akuntansi keuangan daerah adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada entitas ekonomi di lingkungan pemerintahan daerah.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut, maka disusunlah suatu SAP yang ditetapkan Presiden sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP SAP), tertanggal 13 Juni 2005. Setiap entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib untuk menerapkan SAP.

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah

dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah tersebut terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) (www.wikiapbn.com).

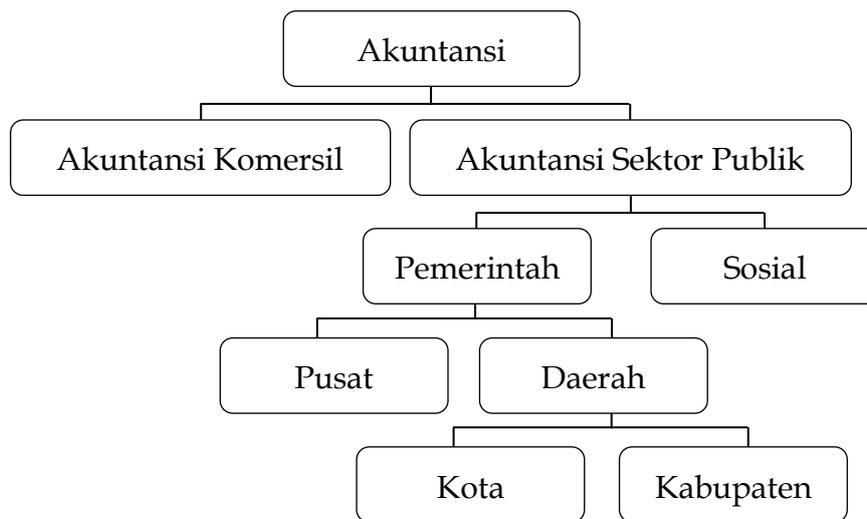
Seperti halnya dalam suatu organisasi profit, para pengambil keputusan dalam organisasi pemerintah pun membutuhkan informasi untuk mengelola organisasi yang dijalankannya. Selain sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, informasi juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pertanggungjawaban pengelolaan organisasi terhadap pihak lain (Siregar dan Siregar, 2001). Oleh karena itu, pemerintah memerlukan suatu standar akuntansi di bidangnya tersendiri dalam menjalankan aktivitas layanan kepada masyarakat luas. Dengan ditetapkannya PP SAP, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Hal ini menandai dimulainya suatu era baru dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam rangka memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan kementerian-kementeriannya maupun di pemerintah daerah (pemda) dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi, serta akuntabilitas.

2) Akuntansi Sosial (*Social Accounting*)

Akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi khusus untuk diterapkan pada lembaga dalam artian makro yang melayani perekonomian nasional. Akuntansi sosial adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi nonprofit atau nirlaba. Secara sederhana, akuntansi sosial ini banyak dipakai oleh organisasi sektor publik, seperti partai politik, masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah atau universitas, dan lembaga swadaya masyarakat.

Berdasarkan klasifikasi di atas, kedudukan akuntansi keuangan daerah (akuntansi pemerintah daerah) dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.



Gambar 1.1 Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah

3. Basis Akuntansi

Dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia, penggunaan basis akuntansi dimulai dengan akuntansi berbasis kas, dilanjutkan dengan akuntansi berbasis kas menuju akrual dan akuntansi berbasis akrual.

a. Akuntansi Berbasis Kas (*Cash Based Accounting*)

Akuntansi berbasis kas merupakan basis akuntansi yang paling sederhana. Dalam basis ini transaksi ekonomi dan kejadian yang terjadi diakui ketika kas diterima atau dibayarkan. Basis kas ini dapat mengukur kinerja keuangan pemerintah yaitu untuk mengetahui penerimaan kas dan pengeluaran kas dalam suatu periode (Harun, 2009). Pengakuan basis kas ini hanya berdasarkan pada kas masuk dan kas keluar saja selain itu fokus pengukuran hanya pada kas, sehingga di neraca yang dilaporkan hanya akun kas dan ekuitas dana yang ada sisi pasiva hanya menggambarkan keadaan atas.

Basis kas merupakan pencatatan transaksi ekonomi hanya apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas Halim dan Syam (2011). Sedangkan menurut Bastian (2009) basis kas adalah mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya pada saldo kas, dengan cara membedakan antara kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. Lingkup akuntansi berbasis kas meliputi saldo kas dan pengeluaran kas. Lebih lanjut Bastian menjelaskan karakteristik dari basis kas antara lain sebagai berikut : 1) Mengukur aliran sumber kas; 2) Transaksi keuangan diakui pada saat uang diterima/dibayarkan; 3) Menunjukkan ketaatan pada batas anggaran

belanja (*Spending Limit*) dan pada peraturan lain; 4) Menghasilkan Laporan yang kurang komprehensif bagi pengambilan keputusan.

b. Akuntansi Berbasis Kas menuju AkruaI (*Cash Toward Accrual Based Accounting*)

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, sedangkan basis akruaI digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana (Erlina dan Rasdianto, 2013).

c. Akuntansi Berbasis AkruaI (*Accrual Based Accounting*)

Teknik basis akruaI memiliki fitur pencatatan dimana transaksi adalah dapat dicatat karena transaksi tersebut memiliki implikasi implikasi uang masuk atau keluar di masa depan. Transaksi dicatat pada saat terjadinya walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan (Ritonga, 2010). Dengan kata lain basis akruaI digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana. Jadi basis akruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (Ritonga, 2010).

Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas. Sistem akuntansi ini merupakan sistem yang paling *modest*. Keberhasilan New Zealand menerapkan akuntansi akruaI telah menyebabkan berbagai perubahan dalam manajemen sektor publik. Dalam akuntansi akruaI, informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang rinci mengenai aktiva dan kewajiban. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan, telah mewajibkan Laporan Keuangan Pemerintah menggunakan basis akrual. Sedangkan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, masih menggunakan basis akuntansi “*cash toward accrual*”.

Perbedaan antara Basis Kas (*Cash Basis*) dengan Basis Akrual (*Accrual Basis*) dapat dilihat dari ilustrasi berikut ini. Sebuah pemerintahan memiliki saldo kas awal sebesar Rp. 20.000,- tanpa memiliki kekayaan lainnya. Neraca awal, baik berbasis kas maupun berbasis akrual, akan terlihat sama.

Kas	Rp. 20.000,-
Ekuiti	Rp. 20.000,-

Misalnya terjadi transaksi pembelian kendaraan senilai Rp. 3.000,-; neraca setelah transaksi tersebut akan ditampilkan secara berbeda di tiap-tiap basis. Pada basis kas, pembelian kendaraan tersebut dianggap sebagai belanja (biaya).

Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah:

Belanja Kendaraan	Rp 3.000,-
Kas	Rp 3.000,-

Pada akhir periode, semua akun belanja (biaya) akan ditutup dan mengurangi nilai ekuitas dana. Sehingga yang akan muncul di neraca pada basis kas tetap akun KAS saja di sisi aktiva, karena fokus pengukuran basis kas hanya pada KAS.

Kas	Rp. 17.000,-	Ekuiti	Rp. 17.000,-
-----	--------------	--------	--------------

Karena fokus pengukuran pada basis akrual adalah semua sumber daya yang dimiliki, maka transaksi pembelian kendaraan tersebut akan dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Kendaraan	Rp 3.000,-
Kas	Rp 3.000,-

Dengan demikian, neraca pada basis akrual akan menampilkan akun Kendaraan (Aset Tetap) selain Kas di sisi aktiva, sedangkan Ekuitas di sisi pasiva tetap Rp. 20.000,-. Hal tersebut menunjukkan fokus pengukuran basis akrual yang melaporkan semua perubahan kekayaan sehingga transaksi tersebut dianggap sebagai penambahan aset tetap.

Kas	Rp. 17.000,-	Ekuiti	Rp. 20.000,-
Kendaraan	Rp. 3.000,-		

Terlihat terjadi perbedaan dalam kedua neraca tersebut sebagai akibat dari satu kejadian transaksi yang sama. Dalam neraca berbasis akrual terdapat akun mobil yang tidak diakui pada neraca berbasis kas. Akan tetapi, yang lebih penting untuk diperhatikan adalah dari transaksi yang sama kedua neraca tersebut menghasilkan nilai ekuitas yang berlainan (Rp. 17.000,- pada neraca berbasis kas dan Rp. 20.000,- pada neraca berbasis akrual).

Basis akuntansi akrual, seperti telah disimpulkan oleh KSAP dari berbagai sumber, adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya

transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Selanjutnya, dalam makalah yang sama, KSAP menyatakan bahwa dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Dengan demikian, pendapatan diakui pada saat penghasilan telah diperoleh (*earned*) dan beban atau biaya diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi. Penerapan basis akrual mencakup pencatatan transaksi keuangan dan juga penyiapan laporan keuangan.

4. Tujuan dan Manfaat Basis Akuntansi Akrual

Secara sederhana, dikatakan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual ditujukan untuk mengatasi ketidakcukupan basis kas untuk memberikan data yang lebih akurat. Dalam presentasinya, *Heather Thompson, Project Manager* dari *Transition from Cash to Accrual Accounting Project, Public Expenditure Management*, pemerintah BARBADOS, menyampaikan beberapa tujuan penggunaan basis akrual yakni sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem keuangan (penganggaran, akuntansi dan pelaporan) dalam sektor publik.
- 2) Untuk meningkatkan pengendalian fiskal, manajemen aset dan budaya sektor publik.
- 3) Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah.

- 4) Menyediakan informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan.
- 5) Untuk mereformasi sistem anggaran belanja (apropriasi).
- 6) Untuk mencapai transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.

Dengan demikian, tujuan penerapan basis akuntansi akrual pada dasarnya untuk memperoleh informasi yang tepat atas jasa yang diberikan pemerintah dengan lebih transparan. Sebagai contoh, biaya-biaya pensiun pegawai pemerintah yang dimasukkan dalam biaya dalam periode akuntansi saat mereka masih dipekerjakan mencerminkan biaya yang sebenarnya, jika dibandingkan dengan pembayaran pensiun yang terakumulasi pada saat pegawai tersebut sudah pensiun dan tidak relevan dengan biaya periode setelah mereka pensiun. Contoh-contoh lain, seperti diuraikan dalam makalah yang sama, adalah belanja modal dari proyek yang merupakan beban periode tahun berjalan dirasa kurang tepat jika dibanding dengan biaya depresiasinya dan beban bunga atas pinjaman berbasis akrual akan memberikan informasi risiko yang lebih akurat, terutama bagi pemberi garansi.

Tujuan penerapan basis akrual lainnya adalah untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah. Negara yang menerapkan basis akuntansi akrual, yang mensyaratkan pada manajernya bertanggungjawab atas hasil atau output dengan mengurangi kendali atas input, secara umum, berada di barisan depan dalam reformasi manajemen publiknya. Para manajer tersebut harus bertanggungjawab atas seluruh biaya yang berkaitan dengan hasil atau output

yang diproduksi, bukan hanya nilai kas yang dibayarkan. Hanya dengan basis akrual, biaya yang sebenarnya dapat diinformasikan dan hal ini akan mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien.

Ringkasnya, ketika para manajer diberikan fleksibilitas dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan (input), mereka berkepentingan untuk menyediakan informasi yang akurat seperti itu. Penerapan basis akrual sejalan dengan tujuan reformasi manajemen keuangan di suatu negara dalam arti yang luas. Penggunaan basis akrual untuk pelaporan keuangan akan berhasil diterapkan pada negara yang secara signifikan mengurangi kendali atas input.

International Monetary Fund (IMF) sebagai lembaga kreditur menyusun *Government Finance Statistics* (GFS) yang di dalamnya menyarankan kepada negara-negara debiturnya untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pembuatan laporan keuangan. Alasan penerapan basis akrual ini karena saat pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya. Sehingga, basis akrual ini menyediakan estimasi yang lebih tepat atas pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perekonomian secara makro. Selain itu basis akrual menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat, termasuk transaksi internal, *in-kind transaction*, dan arus ekonomi lainnya.

Manfaat-manfaat penerapan basis akrual, menurut H Thompson dalam Erlina dan Rasdianto (2013), akan mencakup hal-hal dibawah ini:

- 1) Menyediakan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah
- 2) Menunjukkan bagaimana aktivitas pemerintah dibiayai dan bagaimana pemerintah dapat memenuhi kebutuhan kasnya.
- 3) Menyediakan informasi yang berguna tentang tingkat yang sebenarnya kewajiban pemerintah.
- 4) Meningkatkan daya pengelolaan asset dan kewajiban pemerintah.
- 5) Basis akrual sangat familiar pada lebih banyak orang dan lebih komprehensif dalam penyajian informasinya.

- 6) Prinsip dan standar yang dapat diterima umum membentuk basis transaksi pelaporan.
- 7) Menyediakan data yang lebih meningkat ketika pemerintah melakukan kegiatan perencanaan dan pengambilan keputusan ekonomi.
- 8) Secara signifikan memperkuat pengelolaan dan pengembangan anggaran, khususnya melalui pengakuan dan pengendalian asset dan kewajiban pemerintah.
- 9) Statistik Keuangan Pemerintah (GFS) yang dipraktekkan secara internasional berbasis akrual.

Dengan demikian, alasan-alasan penggunaan basis akrual diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup – misal transaksi non kas - untuk pengambilan keputusan ekonomi misalnya informasi tentang hutang dan piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan.
- 2) Hanya akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya (*full costs of operation*), misalnya keputusan apakah suatu pekerjaan harus dikontrakkan atau dilakukan secara swa kelola.
- 3) Hanya akuntansi berbasis akrual yang dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban.
- 4) Hanya akuntansi berbasis akrual yang menghasilkan informasi keuangan yang komprehensif tentang pemerintah, misalnya penghapusan hutang yang tidak ada pengaruhnya di laporan berbasis kas.

Mengingat manfaat nyata penggunaan basis akrual seperti di atas, seperti yang disampaikan oleh IMF bahwa akuntansi berbasis akrual menyediakan pengukuran yang lebih luas atas batasan komitmen-komitmen keuangan

pemerintah dibanding basis akuntansi kas, makalah ini tidak akan memfokuskan pada masalah pro dan kontra basis akrual, tetapi akan memfokuskan pada strategi penerapan basis akrual. Hal ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah bahwa penerapan basis akrual harus diterapkan mulai tahun anggaran 2009. Dan, pihak legislatif sangat mendukung bahkan mewajibkan kepada pemerintah untuk melakukan hal itu.

Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas Mardiasmo (2002). Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Menurut Bastian (2006), keuntungan basis akrual dapat diperinci sebagai berikut: pertama, bahwa penerimaan dan pengeluaran dalam laporan operasional berhubungan dengan penerimaan dan pemasukannya, yang berarti bahwa basis akrual memberikan alat ukur untuk barang dan jasa yang dikonsumsi, diubah, dan diperoleh. Kedua, basis akrual menunjukkan gambaran pendapatan. Perubahan harga, pendapatan yang diperoleh dalam basis akrual, dan besarnya biaya historis adalah alat ukur kinerja yang dapat diterima. Ketiga, basis akrual dapat dijadikan sebagai alat ukur modal. Di samping itu, basis akrual digunakan untuk mencatat revenue ketika diperoleh dan biaya pada saat terjadi. Dengan kata lain, biaya dicatat ketika utang tanpa memandang kapan pembayaran dilakukan. Dari beberapa uraian diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwa basis akrual akan mengakui transaksi ekonomi tidak didasarkan diterima atau dikeluarkannya uang tetapi ketika terjadi perubahan posisi keuangan perusahaan yang ditandai dengan adanya aliran masuk atau

keluar manfaat ekonomi. Jadi basis akrual akan memberikan informasi yang lebih akurat dan mencatat transaksi sesuai waktunya sehingga konsep periodisasi dapat terpenuhi.

Menurut Bastian (2006), “beberapa masalah aplikasi basis akrual yang dapat diidentifikasi antara lain: pertama, penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dalam jurnal dilakukan oleh individu yang mencatat. Kedua, relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan inflasi. Ketiga, dalam perbandingan dengan basis kas, penyesuaian akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit, sehingga biaya administrasi menjadi lebih mahal. Keempat, peluang manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan”.

5. Komponen Pendukung Kesuksesan dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Penerapan standar akuntansi pemerintahan basis akrual secara penuh ini membutuhkan komponen pendukung demi tercapainya keberhasilan atas penerapannya. Beberapa komponen pendukung keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dipaparkan dalam penjelasan berikut:

a. Komitmen dari pimpinan

Komitmen merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan, karena mencakup loyalitas dan keterlibatannya dalam memberikan dukungan untuk tercapainya suatu tujuan. Komitmen organisasi adalah keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tersebut dan tujuannya, serta berniat untuk memelihara keanggotaannya dalam organisasi tersebut (Erlina dan Rasdianto, 2013). Jadi komitmen menggambarkan kondisi sejauh mana hubungan seorang pegawai dalam melibatkan dirinya pada organisasinya serta memiliki keinginan untuk tetap tinggal di organisasi itu. Penyebab kelemahan penyusunan laporan keuangan pada beberapa kementerian/lembaga adalah dari komitmen

pimpinan satuan kerja khusus SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sebagai penerima dana dekonsentrasi/tugas pembantuan. Oleh karena itu komitmen yang tinggi dari pimpinan juga diperlukan untuk membangun tata kelola dan sistem pengendalian internal organisasi yang baik.

b. Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidak sesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Pelaporan keuangan yang menuntut ketepatan waktu memerlukan tenaga yang mampu bekerja secara kompeten dan memiliki integritas yang baik. Hal ini yang menyebabkan perlunya SDM yang baik dan terlebih menguasai akuntansi pemerintahan (Yafie dalam Erlina dan Rasdianto, 2013).

Manusia merupakan unsur terpenting dalam memberikan kontribusi demi keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya manusia adalah manusia yang mampu melakukan pekerjaan bagi suatu bisnis, dengan memberikan kontribusinya menggunakan kemampuan fisik mereka maupun menggunakan kemampuan mentalnya. Rekrutmen dan pelatihan sumber daya manusia diperlukan agar berkompoten dan profesional dalam pengelolaan keungan. Persiapan dalam sumber daya manusia adalah salah satu faktor utama dalam upaya penerapan SAP berbasis akrual.

c. Teknologi Informasi yang Memadai

Penerapan akuntansi berbasis akrual yang kompleks ini dapat dipastikan memerlukan teknologi informasi yang rumit dan membutuhkan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Teknologi informasi merupakan istilah umum teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi. Teknologi informasi diperlukan untuk memproses dan mengolah berbagai informasi dalam penyusunan laporan keuangan agar sesuai dengan SAP, yaitu Sistem Informasi Keuangan Daerah. Menurut PP Nomor 24 Tahun 2005, Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah.

6. Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis (Bimtek) diartikan sebagai suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan yang biasanya berupa tuntunan dan nasehat untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis (<http://pencerahan-pikiran.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-diklat-bimtek> dan.html, 12 Maret 2013).

Menurut Pusat Diklat Pemerintah Daerah, Kemendagri RI (2015) Bimbingan Teknis diartikan sebagai suatu kegiatan dimana para peserta diberi pelatihanpelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta yang dimana materi yang diberikan meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan

Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur, Kepemimpinan, dll. Adapun tujuan dari dilaksanakannya bimtek adalah untuk menyelesaikan masalah/kasus yang terjadi dan dihadapi oleh para pejabat sehingga penyelesaiannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program Bimtek yang dilakukan juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan para pegawai dalam melaksanakan tugas dan beban tanggung jawab yang diberikan dalam tugas tersebut.

Bimbingan teknis adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan yang biasanya berupa tuntunan dan nasehat untuk menyelesaikan persoalan/ masalah yang bersifat teknis (<https://beritabimtek.wordpress.com/> 7 Juli 2016). Bimbingan Teknis merupakan kegiatan pelatihan dan pengembangan pengetahuan serta kemampuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh setiap individu maupun institusi tertentu. Sehingga dengan mengikuti Bimbingan Teknis diharapkan setiap individu maupun institusi tertentu, baik swasta maupun lembaga pemerintahan, dapat mengambil sebuah manfaat dengan berorientasi pada kinerja. Tujuan dilaksanakannya Bimbingan Teknis adalah Untuk menyelesaikan masalah/kasus yang terjadi dan dihadapi oleh para pejabat sehingga penyelesaiannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa contoh Bimbingan Teknis antara lain Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bimbingan Teknis Kepegawaian, dan sebagainya.

Adanya program bimtek diharapkan adanya peningkatan pengetahuan, keahlian dan keterampilan. Selain itu dengan adanya diklat tersebut akan adanya peningkatan keterampilan yang dapat berguna dalam pekerjaan. Secara kegiatan, bimtek dan diklat memiliki kemiripan yang sama, namun terdapat beberapa perbedaan yang dapat dilihat dari beberapa unsur antara lain dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Perbedaan Antara Diklat dan Bimtek

URAIAN	DIKLAT			BIMTEK
	Pimpinan	Fungsional	Teknis	
Substansi	Kompetensi Dasar	Kompetensi Dasar	Kompetensi Bidang	Masalah/kasus Manajemen PNS
Metode	Andragogi	Andragogi	Andragogi	Tatap Muka/ Ceramah
Tenaga Pengajar	Widyaiswara	Widyaiswara	Widyaiswara	Narasumber
Pelaksana	Badan Diklat	Badan Diklat	Badan Diklat	SKPD
Kurikulum	Berbasis Kompetensi	Berbasis Kompetensi	Berbasis Kompetensi	Tidak ada
Peserta	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional	Pejabat Struktural dan Fungsional	Tidak ada
Tujuan	Peningkatan Kompetensi (K-S-A)	Peningkatan Kompetensi (K-S-A)	Peningkatan Kompetensi (K-S-A)	Penyelesaian masalah

Sumber: Badan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPPKD), 2017.

7. Pelatihan

a. Pengertian

Menurut Mathis (2002), “Pelatihan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi”. Oleh karena itu, proses ini terikat dengan berbagai tujuan organisasi, pelatihan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Secara terbatas, pelatihan menyediakan para pegawai/karyawan dengan pengetahuan yang spesifik dan dapat diketahui serta keterampilan yang digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini. Terkadang ada batasan yang ditarik antara pelatihan dengan pengembangan, dengan pengembangan yang bersifat lebih luas dalam cakupan serta memfokuskan pada individu untuk mencapai kemampuan baru yang berguna baik bagi pekerjaannya saat ini maupun di masa mendatang.

Sedangkan Simanjuntak (2005) mendefinisikan “Pelatihan merupakan bagian dari investasi SDM (*human investment*) untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja, dan dengan demikian meningkatkan kinerja pegawai”. Pelatihan biasanya dilakukan dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan jabatan, diberikan dalam waktu yang relatif pendek, untuk membekali seseorang dengan keterampilan kerja”.

Pelatihan didefinisikan oleh Ivancevich (2008) sebagai “Usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera”. Selanjutnya, sehubungan dengan definisinya tersebut, Ivancevich (2008) mengemukakan sejumlah butir penting yang diuraikan di bawah ini: “Pelatihan (*training*) adalah “sebuah proses

sistematis untuk mengubah perilaku kerja seorang/sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi”. Pelatihan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pelatihan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya.

Sedangkan pelatihan menurut Dessler (2009) adalah “Proses mengajarkan pegawai baru atau yang ada sekarang, ketrampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka”. Pelatihan merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam dunia kerja. Pegawai baik yang baru ataupun yang sudah bekerja perlu mengikuti pelatihan karena adanya tuntutan pekerjaan yang dapat berubah akibat perubahan lingkungan kerja, strategi, dan lain sebagainya.

Dengan mengikutsertakan pegawai ke dalam program diklat pada dasarnya merupakan upaya pengembangan pegawai yang tidak lain adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan dan menambah pengetahuan, kecakapan dan pembentukan pola perilaku sesuai dengan bidang tugas dan kedudukannya selaku aparatur negara. Dengan demikian Diklat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan pegawai/karyawan secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa pelatihan merupakan suatu proses yang akan menghasilkan perubahan perilaku yang ditandai adanya peningkatan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor. Didalamnya mencapai

tujuan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurikulum, metode belajar, mengajar, tenaga pengajar dan fasilitas.

b. Fungsi Pelatihan

Pelaksanaan kegiatan pelatihan sangat penting karena bermanfaat guna menambah pengetahuan atau ketrampilan terutama bagi yang mempersiapkan diri memasuki lapangan pekerjaan. Sedangkan bagi yang sudah bekerja akan berfungsi sebagai “*charger*” agar kemampuan serta kapabilitas kita selalu terjaga guna mengamankan existensi atau peningkatan karir. Rachmawati (2008) menyatakan bahwa pelatihan merupakan wadah lingkungan bagi karyawan, dimana mereka memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan.

Menurut Dharma (2011) terdapat sepuluh cara dimana pelatihan yang berhubungan dengan kinerja ini dapat memberikan kontribusinya kepada peningkatan kinerja organisasi adalah sebagai berikut :

1. Memastikan bahwa pernyataan misi perusahaan tidak hanya dilihat dan didengar oleh para pegawai tetapi juga dipahami, diterima dan ditindak lanjuti;
2. Mengomunikasikan dan mendapatkan komitmen terhadap nilai-nilai organisasi;
3. Sebuah alat yang lebih efektif untuk mencapai perubahan budaya;
4. Menyalurkan sikap-sikap serta kepercayaan-kepercayaan kepada arah yang tepat;
5. Membantu perubahan organisasi dengan memperlengkapi orang dengan keahliankeahlian baru yang diperlukan;
6. Meningkatkan fleksibilitas dengan membantu orang mendapatkan keahlian-keahlian baru (*Multi skiling*);
7. Menyokong inovasi dan pertumbuhan dengan memastikan bahwa orang mampu untuk mengimplementasikan perubahan dan melaksanakan tugas-tugas baru;
8. Mempercepat induksi pada para *trainee*, pemula dan para karyawan yang baru dipromosikan membawa mereka dengan cepat kepada standar kinerja para pekerja yang berpengalaman serta efektif;
9. Menyediakan ruang dan mengembangkan bakat yang dispesifikasikan oleh rencana strategis perusahaan untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang dan target profitabilitas;

10. Meningkatkan keefektifan organisasi secara umum dengan mengisi kesenjangan diantara apa yang dapat dilakukan orang dan apa-apa yang seharusnya mampu mereka lakukan.

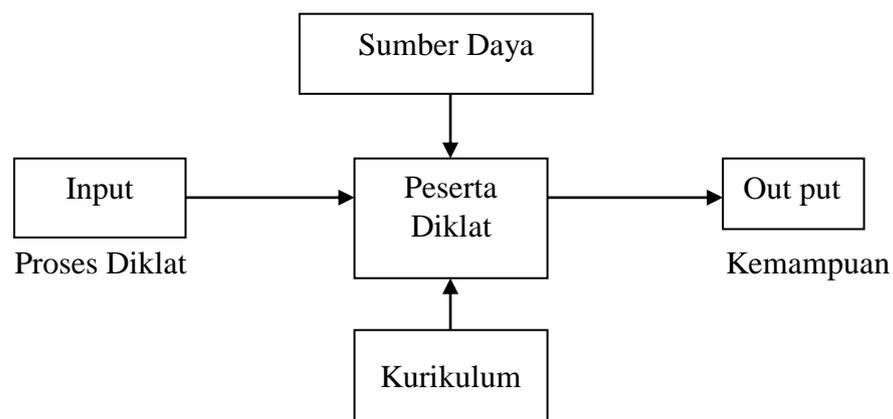
Sedangkan komponen-komponen pelatihan sebagaimana dijelaskan oleh Mangkunegara (2005) terdiri dari :

1. Tujuan dan sasaran pelatihan dan pengembangan harus jelas dan dapat di ukur;
2. Para pelatih (*trainer*) harus ahlinya yang berkualitas memadai (profesional);
3. Materi pelatihan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak di capai;
4. Peserta pelatihan dan pengembangan (*trainers*) harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Dalam pengembangan program pelatihan, agar pelatihan dapat bermanfaat dan mendatangkan keuntungan diperlukan tahapan atau langkah-langkah yang sistematis. Secara umum ada tiga tahap pada pelatihan yaitu tahap penilaian kebutuhan, tahap pelaksanaan pelatihan dan tahap evaluasi. Atau dengan istilah lain ada fase perencanaan pelatihan, fase pelaksanaan pelatihan dan fase pasca pelatihan.

Mangkunegara (2005) menjelaskan bahwa “Tahapan-tahapan dalam pelatihan dan pengembangan meliputi: (1)mengidentifikasi kebutuhan pelatihan / *need assesment*; (2)menetapkan tujuan dan sasaran pelatihan; (3)menetapkan kriteria keberhasilan dengan alat ukurnya; (4)menetapkan metode pelatihan; (5)mengadakan percobaan (*try out*) dan revisi; dan (6)mengimplementasikan dan mengevaluasi”.

Dilihat secara skematis proses pendidikan dan pelatihan itu dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 : Proses Pendidikan dan Pelatihan

Sumber : Notoatmojo, 2009

Selanjutnya perbandingan antara pendidikan dan pelatihan oleh Notoatmojo (2009) dikemukakan seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Perbandingan Antara Pendidikan Dan Pelatihan

No	Mata Pelajaran	Pendidikan	Pelatihan
1.	Pengembangan Kemampuan	Menyeluruh (<i>Overatil</i>)	Pelatihan (<i>specific</i>)
2.	Area Kemampuan (Penekanan)	Kognitif, Afektif dan Psikomotor	Psikomotor
3.	Jangka Waktu Pelaksanaan	Panjang (<i>Long Term</i>) Lebih umum	Pendek (<i>Short Term</i>)
4.	Materi yang diberikan	Konvensional	Lebih Khusus
5.	Penekanan Penggunaan Metode Belajar Mengajar	Gelar (<i>Degree</i>)	<i>Inconventional</i> Sertifikat (<i>Non Degree</i>)
6.	Penghargaan Akhir Proses		

Sumber : Notoatmojo, 2009

Dari berbagai pendapat, terlihat bahwa melalui pendidikan dan pelatihan terbentuk sejumlah kemampuan dan keterampilan dalam diri seseorang aparat/ pegawai yang akan digunakan sebagai bekal dalam melaksanakan tugas yang

diembannya. Pendidikan adalah usaha yang dilakukan secara sadar dalam rangka mengembangkan pengetahuan (wawasan), sedangkan pelatihan lebih diorientasikan kepada kecakapan dan keterampilan dalam mendukung pelaksanaan tugas.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No.	Nama (Tahun)	Judul	Metode Analisis	Hasil
1.	Putri Oktavia (2015)	Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Pemahaman SAP berbasis Akrual terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Banjarmasin	Analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan : 1) pendidikan 2) pelatihan 3) pemahaman SAP berbasis akrual berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan.
2.	Weda Ayu Margareta (2015)	Kesiapan Instansi Pemerintah Dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual	Teknik wawancara dan dokumentasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa staf bagian keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur sudah cukup siap dalam penerapan SAP akrual, hal tersebut telah dibuktikan dengan para staf bagian keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur yang telah melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan. Bentuk persiapannya yaitu dengan mengikuti bimbingan teknis (Bintek) atau pelatihan dari Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD), dan mengikuti berbagai <i>workshop</i> mengenai implementasi standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual.

3.	Hesti Widiyanti (2017)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Akuntansi AkruaI Pada Sektor Pemerintah	Statistik deskriptif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda	<p>1)Tingkat pendidikan staf keuangan berpengaruh terhadap Penerapan akuntansi akruaI</p> <p>2)Pelatihan staf keuangan tidak berpengaruh terhadap Penerapan akuntansi akruaI</p> <p>3)Kualitas teknologi informasi terbukti berpengaruh terhadap Penerapan akuntansi akruaI</p> <p>4)Dukungan konsultan berpengaruh terhadap Penerapan akuntansi akruaI</p> <p>5)Pengalaman menjalankan basis kas menuju akruaI berpengaruh terhadap variabel Penerapan akuntansi akruaI</p> <p>6)Latar belakang pendidikan pimpinan tidak berpengaruh terhadap Penerapan akuntansi akruaI</p> <p>7)Ukuran satuan kerja tidak berpengaruh terhadap variabel Penerapan akuntansi akruaI</p> <p>8)Tingkat pendidikan staf keuangan, pelatihan staf keuangan, kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan, pengalaman menjalankan basis kas menuju akruaI, latar belakang pendidikan pimpinan, ukuran satuan kerja berpengaruh secara bersama-sama terhadap penerapan akuntansi akruaI.</p>
4.	I Gusti Ayu Cintya Suri AW dan I Wayan Ramantha. (2017)	Pengaruh Kompetensi pada Penerapan Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah	Analisis regresi linear berganda	Hasil analisis tidak ada pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja pada penerapan perlakuan akuntansi aset bersejarah. Hal ini menunjukkan tingkat pendidikan dan jangka waktu bekerja tidak mempengaruhi dari penerapan perlakuan akuntansi aset bersejarah. Sedangkan, hasil analisis

				menemukan bahwa pemahaman standar akuntansi berpengaruh pada penerapan perlakuan akuntansi aset bersejarah. Hal ini menunjukkan semakin paham pengelola pada standar akuntansi akan meningkatkan penerapan perlakuan akuntansi aset bersejarah.
--	--	--	--	---

C. Kerangka Konseptual

Penentuan kerangka konseptual dalam penelitian suatu akan sangat membantu dalam menentukan arah pelaksanaan penelitian. Kerangka konseptual merupakan kerangka pikir mengenai hubungan antar variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian atau hubungan antar konsep dengan konsep lainnya dari masalah yang diteliti sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada studi kepustakaan. Konsep dalam hal ini adalah suatu abstraksi atau gambaran yang dibangun dengan menggeneralisasikan suatu pengertian. Oleh karena itu, konsep tidak dapat diamati dan diukur secara langsung. Agar supaya konsep tersebut dapat diamati dan diukur, maka konsep tersebut harus dijabarkan terlebih dahulu menjadi variabel-variabel.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual merupakan basis akuntansi yang paling relevan sesuai kebutuhan dan kondisi sekarang. Hal ini karena kelebihan SAP akrual dapat menghasilkan laporan keuangan yang memungkinkan pengguna laporan untuk mengetahui kemampuan pemerintah untuk membiayai aktivitas-aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban komitmen-komitmennya. Sehingga laporan keuangan berbasis akrual

dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya (Mulyana, 2009).

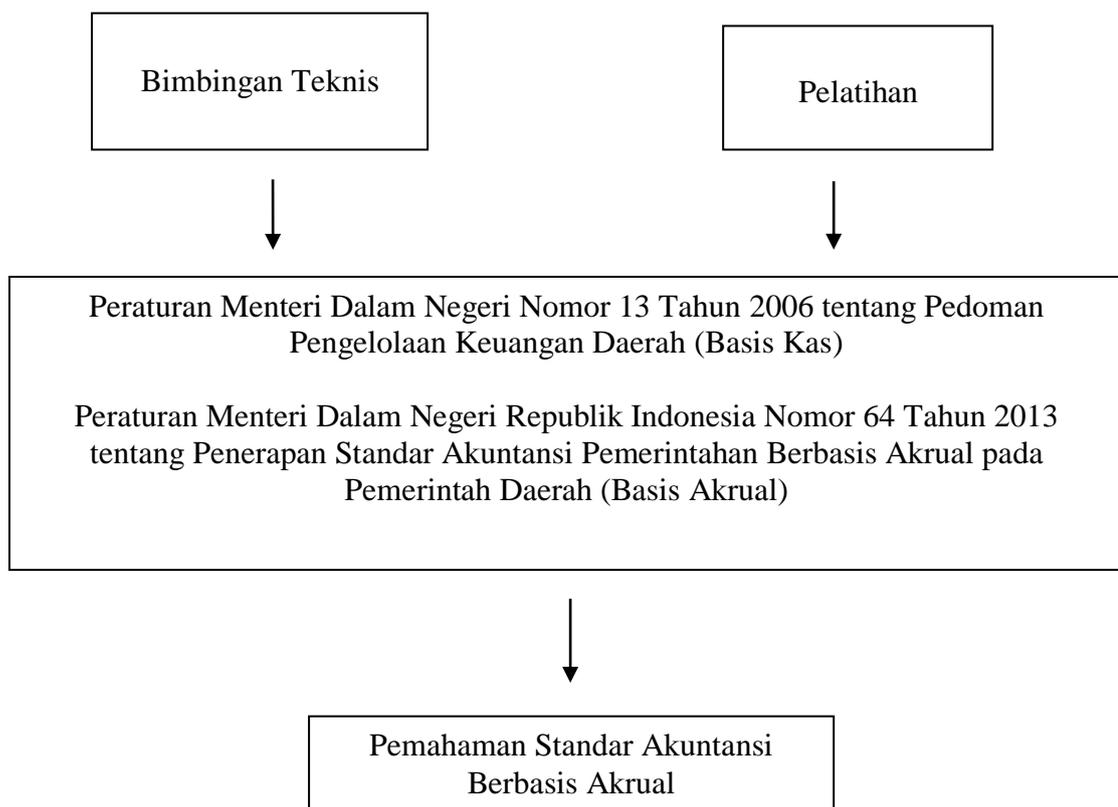
Pemerintah Kota Binjai hingga tahun anggaran 2015 sudah menerapkan basis akuntansi akrual. Dengan basis akuntansi akrual ini, Pemerintah Kota Binjai memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan tahun 2015. Namun atas laporan keuangan tahun 2016, Pemerintah Kota Binjai berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dicapai jika dalam menyajikan laporan keuangan, pemerintah daerah berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan.

Bimbingan teknis diartikan sebagai suatu kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta yang dimana materi yang diberikan meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur, Kepemimpinan, dll.

Adapun tujuan dari dilaksanakannya bimtek adalah untuk menyelesaikan masalah/kasus yang terjadi dan dihadapi oleh para pejabat sehingga penyelesaiannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program Bimtek yang dilakukan juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan para pegawai dalam melaksanakan tugas dan beban tanggung jawab yang diberikan dalam tugas tersebut. Adanya program bimtek dan pelatihan diharapkan adanya

peningkatan pengetahuan, keahlian dan keterampilan. Selain itu dengan adanya diklat tersebut akan adanya peningkatan keterampilan yang dapat berguna dalam pekerjaan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, diduga tingkat adanya kegiatan bimbingan teknis dan pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan sumber daya aparatur dalam memahami Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual seperti dapat dilihat dalam kerangka konseptual berikut:



Gambar 2.
Kerangka Konseptual

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tingkat eksplanasinya (tingkat kejelasan) penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian asosiatif yaitu merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan diskriptif dan komparatif karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala (Sugiyono, 2012).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai, jalan Jambi Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dimulai pada bulan Agustus hingga Maret 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari uraian tabel jadwal penelitian berikut ini:

Tabel 3.1
Skedul Proses Penelitian

No	Kegiatan	BULAN							
		Agus-18	Sep-18	Okt-18	Nov-18	Des-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19
1	Pengajuan Judul								
2	Penyusunan Proposal								
3	Perbaikan Proposal								
4	Seminar Proposal								
5	Riset ke Lokasi Penelitian								
6	Bimbingan Skripsi								
7	Sidang Meja Hijau								

Sumber : Jadwal Penelitian, 2018-2019

C. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel bebas yaitu: Bimbingan Teknis dan Pelatihan, sedangkan variabel terikat yaitu: Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

Tabel 3.2 Definisi Operasional

Variabel Penelitian	Definisi Operasional
Bimbingan Teknis	Suatu kegiatan dimana para peserta diberi pelatihanpelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta yang dimana materi yang diberikan meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme

	Aparatur, Kepemimpinan, dll. (Menurut Pusat Diklat Pemerintah Daerah, Kemendagri RI 2015)
Pelatihan	Suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. (menurut Mathis, 2002)
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua	Pemahaman atas standar akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah menurut SAP berbasis akrual terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan keuangan. Pemahaman SAP juga terkait dengan pemahaman dalam menjalankan basis akrual (Menurut Situmorang, 2016)

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2012) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Aparatur Sipil Negara pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai yang berjumlah 97 orang.

2. Sampel

Menurut Arikunto (2013) “Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti”.

Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu para pegawai pada Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai sebanyak 11 orang.

E. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2012), menjelaskan bahwa: Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang

diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. Tipe penelitian ini berusaha menerangkan fenomena sosial tertentu. Penelitian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, berdasarkan kriteria pembedaan antara lain fungsi akhir dan pendekatannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data primer yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara.

F. Teknik Pengumpulan Data

Arikunto (2013) menyatakan "metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data penelitiannya". Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa metode penelitian adalah cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data yang di perlukan dalam penelitian. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuisisioner dan melakukan wawancara secara mendalam kepada para pengelola keuangan yang ada di Badan Penegelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.

G. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai faktanya. Sedangkan metode kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari kuisisioner dan naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realitas empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Dengan menggunakan ulasan faktor intervensi terhadap data yang diperoleh sehingga lebih jelas dan bermakna dibandingkan dengan standar angka-angka. Adapun tahapan analisis yang dilakukan sebagai berikut:

1. Mempelajari data tentang Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai;
2. Menganalisis data dengan mendeskriptifkannya/menggambar data;
3. Menarik kesimpulan atas penelitian yang dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai yang beralamat di jalan Jambi Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai dan Peraturan Walikota Binjai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai mempunyai tugas pokok sebagai berikut: “Melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kota Binjai dalam pengelolaan keuangan daerah, pendapatan dan asset daerah”.

Adapun untuk melaksanakan tugas pokok itu Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. Melaksanakan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- c. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- d. Melaksanakan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, keuangan, pendapatan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan tata laksana kantor;
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penagihan PBB, BPHTB, retribusi dan pajak daerah lainnya;
- g. Melakukan koordinasi penyusunan rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengembangannya(ekstensifikasi/intensifikasi);
- h. Menyiapkan rencana kebijakan dan atau strategi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembayaran penagihan PBB, BPHTB, Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya;
- i. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- j. Melaksanakan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- k. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Melakukan pengujian atas penagihan dan memerintahkan pembayaran;
- m. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- n. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- o. Melaksanakan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dapat dijabarkan menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. **Aspek Administrasi Keuangan Daerah**, tugasnya meliputi :
 - a. Pelaksanaan perumusan, perencanaan, pelayanan administrasi pengendalian dan koordinasi belanja daerah.
 - b. Pengkajian kebutuhan daerah.
 - c. Pelaksanaan pengawasan teknis pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SP2) dibidang pendapatan dan belanja daerah.
 - e. Penyelenggaraan sistem informasi keuangan dan aset daerah.
 - f. Pembinaan dan bimbingan di bidang pendapatan, belanja dan aset daerah.
2. **Aspek Pendapatan Daerah**, tugasnya meliputi :
 - a. Melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis Pemerintah Daerah di bidang pendapatan
 - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum di bidang pendapatan.
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan.
3. **Aspek Pengelolaan Aset Daerah**, tugasnya meliputi :

- a. Penyusunan perumusan, perencanaan bidang aset daerah.
- b. Koordinasi perencanaan analisa kebutuhan pengadaan aset, pendataan, penginventarisasian dan pencatatan aset.
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset daerah.
- d. Penyusunan Data Base Aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Binjai.
- e. Penyusunan laporan realisasi dan kinerja dibidang aset daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Program.
3. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Belanja Tidak Langsung;
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Non Langsung;
 - c. Sub Administrasi dan Pelaporan Perbendaharaan.
4. Bidang Anggaran terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Belanja Langsung;

- b. Sub Bagian Belanja Tidak Langsung;
 - c. Sub Bidang Verifikasi Anggaran Belanja Dan Pendapatan.
5. Bidang Akuntansi terdiri dari :
- a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Sub Bidang Pelaporan Pendapatan dan Belanja;
 - c. Sub Bidang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
6. Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pelayanan PBB Dan BPHTB;
 - b. Sub Bidang Penetapan PBB Dan BPHTB;
 - c. Sub Bidang Pengendalian PBB Dan BPHTB.
7. Bidang Retribusi Dan Pajak Daerah Lainnya terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pelayanan Retribusi Dan Pajak Daerah Lainnya;
 - b. Sub Bidang Penetapan Retribusi Dan Pajak Daerah Lainnya;
 - c. Sub Bidang Pengendalian Retribusi Dan Pajak Daerah Lainnya.
8. Bidang Pengelolaan Aset Daerah terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pendataan Aset Daerah;
 - b. Sub Bidang Optimalisasi Aset;
 - c. Sub Bidang Pengendalian Aset Daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Deskripsi Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Kota Binjai

Berdasarkan data penelitian yang telah dikumpulkan, maka diperoleh data tentang responden penelitian yang terdiri dari: (1)Jenis Kelamin, (2)Tingkat Pendidikan, dan (3)Pangkat/Golongan.

Tabel 4.1
Jenis Kelamin Pegawai

No	Janis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Pria	52	53,61
2	Wanita	45	46,39
Total		97	100,00

Sumber: Hasil Rekapitulasi Pegawai, 2018

Berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat persentase pegawai pria sebanyak 52 orang atau sebesar 53,61% dan pegawai wanita sebanyak 45 orang atau 46,39%.

Selanjutnya dapat dilihat tingkat pendidikan para pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2
Tingkat Pendidikan Pegawai

No.	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Pasca Sarjana	5	5,15
2	Sarjana	61	62,89
3	Akademi/D3	8	8,25
4	SLTA	23	23,71
Total		97	100,00

Sumber: Hasil Rekapitulasi Pegawai, 2018

Berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat sebanyak 23 orang (23,71 %) pegawai memiliki tingkat pendidikan SLTA, 8 orang (8,25%) pegawai dengan tingkat pendidikan Diploma, 61 orang (62,89%) dengan tingkat pendidikan S1, dan 5 orang (5,15%) responden dengan tingkat pendidikan S2.

Tabel 4.3
Pangkat Golongan Pegawai

No.	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Golongan IV	5	5,15
2	Golongan III	70	72,16
3	Golongan II	21	21,65
4	Golongan I	1	1,03
	Total	97	100,00

Sumber: Hasil Rekapitulasi Kuisisioner, 2018

Berdasarkan pangkat golongan responden, dapat dilihat responden berdasarkan golongan yaitu, sebanyak 5 orang atau 5,15% responden Golongan IV, sebanyak 70 orang atau 72,16% responden Golongan III, sebanyak 21 orang atau 21,65% responden Golongan II, dan hanya 1 orang atau 1,03% responden yang berlatar belakang Golongan I.

B. Pembahasan

1. Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Pemerintah Kota Binjai mulai menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bagi seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada di lingkungan Pemko Binjai dalam penyajian laporan keuangannya sejak tahun 2008, dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada para pegawai khususnya para Kepala SKPD (Satuan Kerja

Perangkat Daerah)/ penatausaha keuangan/ bendahara di SKPD-SKPD yang ada agar memahami proses akuntansi keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain sosialisasi, juga dilakukan pelatihan prosedur dan sistem akuntansi yang digunakan, pelatihan tersebut tidak hanya bersifat manual saja akan tetapi juga dengan praktek secara komputerisasi. Sedangkan penerapan akuntansi berbasis akrual sudah dimulai sejak tahun 2014, menyeluruh kepada seluruh unit kerja yang ada. Penyusunan laporan keuangan dimaksudkan untuk menyediakan informasi dan menyajikan secara lengkap mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas akuntansi selama satu periode pelaporan dan sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Setelah melihat dan menganalisis Laporan Keuangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tahun Anggaran 2014 sampai dengan tahun 2017 dan melakukan observasi langsung serta wawancara dengan para aparatur di bidang akuntansi sebagai bidang yang bertugas menyusun LKPD Pemerintah kota Binjai, maka didapati hal berikut :

1. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota telah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrual yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan

Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
3. Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemko Binjai yaitu :
 - 1) Basis Kas untuk Laporan LRA, LPSAL, dan LAK;
 - 2) Basis AkruaI untuk LO, LPE, dan Neraca.

Pada Tahun 2014 Pemerintah Kota Binjai telah menerapkan Basis AkruaI dalam Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan.

Basis Kas adalah Basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan sedangkan Basis AkruaI adalah Basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis akruaI untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas

diterima atau dibayar oleh kas daerah. Dalam hal ini sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Dari hasil kuisioner diperoleh gambaran mengenai pemahaman standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Persepsi responden terhadap Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	-	11	-	-	-
2	3	6	2	-	-
3	3	8	-	-	-
4	-	10	1	-	-
5	4	6	1	-	-

Sumber: Rekapitulasi jawaban responden, 2018

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dilihat persepsi responden mengenai pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang menurut persepsi responden yang dijalankan di SKPD responden diuraikan sebagai berikut:

1. Seluruh responden menyatakan setuju bahwa responden memahami Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.
2. Mayoritas responden (6 responden) menyatakan sangat setuju bahwa tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas/kepala SKPD.
3. Mayoritas responden (8 responden) menyatakan setuju bahwa Laporan keuangan harus disajikan sesuai dengan SAP/kebijakan akuntansi.

4. Mayoritas responden (10 responden) menyatakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.
5. Mayoritas responden (6 responden) menyatakan bahwa responden memperoleh pemahaman SAP berbasis AkruaI dari Bimbingan Teknis dan Pelatihan yang diikuti.

3. Bimbingan Teknis

Dari hasil kuisioner diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan bimbingan teknis yang dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5 Persepsi responden terhadap Bimbingan Teknis

Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	1	9	1	-	-
2	3	6	2	-	-
3	3	8	-	-	-
4	-	11	-	-	-
5	3	8	-	-	-

Sumber: Rekapitulasi jawaban responden, 2018

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat dilihat persepsi responden terhadap pelaksanaan bimbingan teknis yang menurut persepsi responden yang dijalankan di SKPD responden diuraikan sebagai berikut:

1. Mayoritas responden (9 responden) menyatakan setuju bahwa responden Pelaksanaan Bimtek yang diikuti telah sesuai dengan tugas/perkerjaan di kantor
2. Mayoritas responden (6 responden) menyatakan sangat setuju bahwa metode yang diberikan dalam kegiatan Bimtek seharusnya lebih bersifat teknis daripada hanya teoritis.
3. Mayoritas responden (8 responden) menyatakan setuju bahwa Instruktur/Pemateri Bimtek memiliki keahlian teknis dalam materi yang diberikan.
4. Mayoritas responden (11 responden) menyatakan fasilitas dalam pembelajaran, membantu saya dalam memahami apa yang disampaikan dalam Bimtek.
5. Mayoritas responden (8 responden) menyatakan bahwa pimpinan Unit Kerja memberikan dukungan apabila ada Pegawai yang mengikuti Bimtek.

Berdasarkan rekapitulasi jawaban reponden di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan mampu meningkatkan pemahaman standar akuntansi berbasis akrual bagi para pelaksana penatausahaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.

4. Pelatihan

Dari hasil kuisisioner diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pelatihan yang dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6 Persepsi responden terhadap Pelaksanaan Pelatihan

Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	1	9	1	-	-
2	-	11	-	-	-
3	2	8	1	-	-
4	3	8	-	-	-
5	-	11	-	-	-
6	3	8	-	-	-

Sumber: Rekapitulasi jawaban responden, 2018

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat dilihat persepsi responden terhadap pelaksanaan pelatihan yang menurut persepsi responden yang dijalankan di SKPD responden diuraikan sebagai berikut:

1. Mayoritas responden (9 responden) menyatakan sangat setuju bahwa lamanya Program Pelatihan perlu disesuaikan agar sasarannya dapat tercapai.
2. Mayoritas responden (11 responden) menyatakan setuju bahwa sebagai pegawai, responden seharusnya mendapatkan pelatihan agar prestasi kerjanya dapat meningkat.
3. Mayoritas responden (8 responden) menyatakan bahwa kemampuan responden dalam melaksanakan tugas dirasakan masih perlu ditingkatkan, untuk itu perlu adanya pelatihan lanjutan.
4. Mayoritas responden (8 responden) menyatakan bahwa Program pelatihan sebaiknya dilaksanakan secara berkesinambungan.
5. Mayoritas responden (11 responden) menyatakan bahwa Instruktur Program Pelatihan haruslah orang yang benar-benar menguasai topik, baik secara teori maupun pelaksanaan di lapangan.

6. Mayoritas responden (8 responden) menyatakan bahwa pelatihan diikuti oleh orang/pegawai yang sesuai dengan bidang tugas yang dilaksanakannya.

Berdasarkan rekapitulasi jawaban reponden di atas dapat disimpulkan bahwa pelatihan mampu meningkatkan pemahaman standar akuntansi berbasis akrual bagi para pelaksana penatausahaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.

5. Pengaruh pelaksanaan bimtek dan pelatihan mengenai pemahaman standar akuntansi berbasis akrual bagi para pelaksana penatausahaan keuangan daerah

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung di Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai, yaitu dengan pada Kepala Sub Bidang yang terdiri dari Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja, Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Kepala Sub Bidang Pelaporan, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Binjai telah menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam penatausahaan keuangannya sejak tahun 2014 dengan penerapan pelaporan secara penuh berbasis akrual sejak tahun anggaran 2015.
2. Data yang dikumpulkan peneliti melalui wawancara dengan beberapa informan, menunjukkan bahwa ketika ditanyakan mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, mereka sudah tahu akan definisi

dari basis akrual itu sendiri, seperti yang di katakan oleh para kepala Sub Bidang yang ada di Bidang Akuntansi bahwa akuntansi basis akrual itu merupakan suatu basis dimana transaksi ekonomi dan transaksi lainnya dicatat, diakui dan disajikan dalam laporan keuangan tanpa melihat kas atau setara kas telah diterima atau dibayarkan.

Dari pandangan para informan di atas terhadap pengertian basis akrual, dapat dikatakan bahwa aparat pengelola keuangan di pemerintah kota Binjai telah mengetahui akuntansi pemerintahan basis akrual itu seperti apa.

3. Bimbingan teknis dan pelatihan diselenggarakan secara rutin minimal satu kali dalam setahun bagi seluruh bendahara, pejabat penatausaha keuangan (PPK) SKPD, dan para operator SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah), serta di lakukan juga kegiatan *coaching* klinik (pendampingan) bagi para pengurus barang dan penata usaha keuangan secara rutin.

Saat ditanyakan mengenai pelatihan tentang PP No.71 tahun 2010, mereka menjawab pernah dilakukan bahkan diantara mereka ada yang sudah lebih dari dua kali mengikuti pelatihan tersebut. Menyangkut dengan sosialisasi Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual dan PP No.71 tahun 2010, mereka menuturkan sudah pernah dilakukan oleh pemerintah lebih dari satu kali dan mereka mengatakan sudah ada alokasi SDM yang dipersiapkan khusus untuk pembuatan laporan keuangan berbasis akrual ini. Dengan adanya kegiatan bimbingan teknis

dan diklat yang dilaksanakan bagi para penatausaha keuangan daerah yang ada di lingkungan pemerintah Kota Binjai secara signifikan berpengaruh positif dalam meningkatkan pemahaman akuntansi berbasis akrual.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis pada bab-bab sebelumnya diketahui bahwa bimbingan teknis dan pelatihan diselenggarakan secara rutin minimal satu kali dalam setahun bagi seluruh bendahara, pejabat penatausaha keuangan (PPK) SKPD, dan para operator SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah), serta di lakukan juga kegiatan *coaching* klinik (pendampingan) bagi para pengurus barang dan penata usaha keuangan secara rutin, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

1. Bimbingan teknis mampu meningkatkan pemahaman standar akuntansi berbasis akrual bagi para pelaksana penatausahaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai
2. Pelatihan mampu meningkatkan pemahaman standar akuntansi berbasis akrual bagi para pelaksana penatausahaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

B. Saran

Mengingat bimbingan teknis dan pelatihan berpengaruh terhadap pemahaman SAP berbasis akrual pada Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kota Binjai dapat melakukan beberapa upaya dalam rangka meningkatkan penyusunan laporan keuangan diantaranya:

1. Menempatkan pegawai dengan latar belakang pendidikan akuntansi pada bidang yang berhubungan dengan keuangan seperti pada sub bagian keuangan lebih baik diisi oleh pegawai yang berlatar belakang akuntansi, agar dalam proses pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan dengan mudah;
2. Meningkatkan kualitas dalam kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan akuntansi keuangan ataupun pelatihan mengenai pemahaman SAP berbasis akrual, agar pegawai yang ikut serta dalam pelatihan dapat memperbaiki diri dalam proses pengelolaan keuangan, dan lebih mudah memahami tata kelola keuangan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Basis Akrual).

DAFTAR PUSTAKA

- A. Atika, D. Saraswati, H Chrisna, HAP Nasution, S Pipit Buana (2018). Sukuk Fund Issuance On Sharia Banking Performance In Indonesia. *Int. J. Civ. Eng. Technol* 9 (9), 1531-1544
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayu, I Gusti Cintya Suri AW dan I Wayan Ramantha. 2017. Pengaruh Kompetensi pada Penerapan Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah. *ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.19.3. Juni (2017): 2319-2347*. Universitas Udayana.
- Ayu, Weda Margareta. 2015. Kesiapan Instansi Pemerintah Dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 9 (2015). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.
- Badan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPPKD) <https://www.bppkpd.id/pengertian-diklat-dan-bimtek-serta-perbedaannya/> , 6 Agustus 2017, diakses 09 April 2018 pukul 12.37 WIB).
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Bungin, M. Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chrisna, H. (2019). Pengaruh Perilaku Belajar, Pengendalian Diri, Motivasi, Empati, Keterampilan, Dan Kepercayaan Diri Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 87-100.
- Daulay, M. T., Elfindri, Sjafrizal, & Sofyardi. (2018). 1. An Empirical Investigation of Business Diversification and Economic Value on Poverty in Batubara Regency, North Sumatera, Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, 841-859.
- Daulay, M. T., Sanny, A., Rini, E. S., & Sadalia, I. (2018). FACTORS THAT INFLUENCING THE SATISFACTION AND LOYALTY OF SILKAIR INTERNATIONAL FLIGHT SERVICE PASSENGERS AT KUALANAMU AIRPORT, DELI SERDANG, INDONESIA. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)* , 1-10.
- Dessler, Gary. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Index. Dharma, Surya. 2011. *Manajemen Kinerja*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Erlina dan Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Medan. CV. Brama Ardian.
- Fadly, Y. (2019). Performa Mahasiswa Akuntansi Dalam Implementasi *English For Specific Purpose (ESP)* Di Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) MEDAN. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 190-201.

- Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. dan Syam, M. 2011. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Helen. 2016. Pengaruh Tingkat Pemahaman, Pelatihan dan Pendampingan Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Penerapan Accrual Basis Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Jember (Studi Kasus pada Dinas Pemerintahan Kabupaten Jember). *Relasi-Jurnal Ekonomi Mandala Jember*. STIE Mandala Jember.
- Herlina, Hetti. 2013. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintahan Daerah Dalam Implementasi PP 71 tahun 2010 (Studi Empiris : Kabupaten Nias Selatan)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.
- Ivancevich, John. M, dkk. 2008. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta : Erlangga.
- Kesuma, M. A., Lubis, S., Iskandarini, & Daulay, M. T. (2019). The Influence Of Organizational Restructuring On Employee Performance In The Housing And Residential Areas, North Sumatra Province, Indonesia. *American International Journal of Business Management (AIJBM)*, 32-36.
- Kirnanda, Agus. 2016. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Binjai Dengan Perubahan Anggaran Sebagai Variabel Moderating. *Thesis*. Universitas Sumatera Utara.
- Maisyarah, R. (2018). *Analysis of the Determinants Competition Oligopoly Market Telecommunication Industry in Indonesia*. *KnE Social Sciences*, 760-770.
- Mangkunegara, Anwar Prabu., 2005. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung : Refika Aditama.
- Mardiasmo.2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Mathis dan Jackson. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Mulyana, Budi. 2009. *Penggunaan Akuntansi Akrua di Negara-negara Lain: Tren di Negara-Negara Anggota OEACD*. Hal. 1-28. <http://sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/10/Akuntansi-berbasis-akrua.pdf>.
- Nasution, A. P. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Dilingkungan Kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 15-25.
- Nasution, A. P. (2019). Implementasi *E-Budgeting* Sebagai Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 1-13.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149-162.

- Nasution, D. A. D. (2019, August). *The Effect of Implementation Islamic Values and Employee Work Discipline on The Performance of Moslem Religious Employees at Regional Financial Management in the North Sumatera Provincial Government. In International Halal Conference & Exhibition 2019 (IHCE)* (Vol. 1, No. 1, pp. 1-7).
- Notoadmodjo, Soekidjo. 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Penerbit PT. Rineka Cipta.
- Oktavia, Putri, dkk. 2015. Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Pemahaman Sap Berbasis Akruar Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Banjarmasin. *JSAI: Vol. 2 No. 1 Juni 2015 Hal 13- 24*. Universitas Lambung Mangkurat.
- Purba, R. B. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 99-111.
- Rachmawati, Ike Kusdyah. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: ANDI.
- Ranilhaj, Ersya Resya. 2016. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Akuntansi Akruar Pada Unit Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Kota Bogor*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Lampung.
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : Sekolah Pasca Sarjana UGM.
- Ritonga, M. (2018). Faktor Manajemen Biaya Dan Manajemen Pemasaran Terhadap Pendapatan Melalui Intensitas Produksi Pada Ukm Industri Rumahan Di Kota Binjai. *JUMANT*, 8(2), 68-78.
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Situmorang, Juanda. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Pengelola Keuangan SKPD Dalam Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Pemerintah Kabupaten Samosir. *Thesis*. Universitas Sumatera Utara.
- Skousen, K.F dan Smith, J.M, 2009. *Akuntansi Intermediate jilid 1 & 2, edisi kesembilan*. Penerbit : Erlanga. Jakarta.
- Solihin, Dadang. 2007. *Seminar Penerapan Good Governance Di Sektor Publik Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Public, Bimtek Dan Orientasi Nasional Penguatan Kedudukan/Fungsi DPRD Dan Pemda Pada Pelaksanaan System Pengawasan, Budgeting Dan Legislasi Berbasis Kinerja Hotel Jayakarta-Legian, 26 April 2007*.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Weda, Ayu Magareta. 2015. Kesiapan Instansi Pemerintah Dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 9 (2015)*.

Widianti, Hesti. 2017. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Akuntansi fAkrual Pada Sektor Pemerintah*. ISBN: 978-602-74355-0- 6. Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Yuliana, Dina Darmawati. 2017. *Analisis Kesiapan Dians Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam menerapkan Standar Akuntansi Berbasis Akrual*. Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

_____ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

_____ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

_____ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

_____ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.

_____,Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standard Akuntansi Pemerintahan.

_____,Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

_____ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007, *tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota*.

_____,Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013, *tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*.

_____ Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 *tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai dan Peraturan Walikota Binjai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai*.

<http://pencerahan-pikiran.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-diklat-bintek-dan.html>, 12 Maret 2013) diakses 09 April 2018 pukul 12.37 WIB)

<https://beritabimtek.wordpress.com/> 7 Juli 2016, diakses 09 April 2018 pukul 12.37 WIB)

<http://www.pusdikpemda.co.id>